



Effects of Budget Planning, Control, Realization on Ad Hoc Performance: HR Competence Moderation

Pengaruh Perencanaan, Pengawasan, Realisasi Anggaran terhadap Kinerja Badan Adhoc: Moderasi Kompetensi SDM

Muh Erwinsyah

Master of Accounting at Tadulako University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muh Erwinsyah

✉ muherwinsyah09@gmail.com

History:

Submitted: 19-05-2026

Revised: 19-06-2026

Accepted: 29-06-2026

Keyword:

New Institutional Economics; Fiscal Governance; Allocative Efficiency; Lock-in Effect; Digital Budgeting.

Kata Kunci:

Ekonomi Kelembagaan Baru; Tata Kelola Fiskal; Efisiensi Alokasi; Efek Penguncian; Digitalisasi Anggaran.

Abstract

This study evaluates the fiscal governance efficiency of adhoc electoral institutions in Indonesia following the recent national elections. Utilizing the new institutional economics framework, this research examines the impact of budget planning, control, and realization on organizational performance, alongside testing the moderation effect of human resource competence. Employing an econometric approach on 183 observational units within Banggai Regency, empirical estimations prove that planning is entirely insignificant due to centralized regulatory rigidity. Conversely, absolute allocative efficiency is purely driven by accelerated budget realization and effective layered monitoring, which successfully mitigates economic deadweight loss. Furthermore, individual operational capacity fundamentally fails to moderate performance outcomes because of the bureaucratic lock-in effect. These macroeconomic findings radically deconstruct human capital theory by asserting that developing nations must halt wasteful temporal personnel investments. Public policy must urgently shift toward integrated digital financial systems to secure local fiscal space stability against any future global economic recession threats.

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efisiensi manajemen fiskal pada lembaga adhoc pemilihan umum pasca pemilu serentak nasional. Melalui kerangka ekonomi kelembagaan baru, studi ini mengkaji dampak perencanaan, pengawasan, dan realisasi anggaran terhadap kinerja organisasi, serta menguji moderasi kompetensi sumber daya manusia. Menggunakan pendekatan ekonometrika terhadap 183 unit observasi empiris di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, hasil estimasi statistik membuktikan bahwa perencanaan sama sekali tidak signifikan akibat kekakuan regulasi terpusat. Sebaliknya, efisiensi alokasi absolut murni didorong oleh percepatan realisasi anggaran dan efektivitas pengawasan berlapis yang memitigasi kerugian ekonomi. Lebih jauh, kapasitas operasional individu terbukti mutlak gagal memoderasi kinerja akibat fenomena penguncian birokrasi. Temuan makroekonomi ini mendekonstruksi teori modal manusia secara radikal dengan menegaskan bahwa negara berkembang wajib menghentikan pemborosan investasi sumber daya manusia yang bersifat temporal. Kebijakan publik harus segera dialihkan secara fundamental menuju penguatan infrastruktur digitalisasi sistem keuangan terintegrasi demi menyelamatkan sekaligus mengamankan stabilitas ruang fiskal dari ancaman resesi pada masa depan nanti.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/jsr.v1i4.424>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Transisi politik pasca-Pemilu Serentak 2024 dan 2025 telah mewariskan tekanan makro-fiskal yang signifikan bagi arsitektur keuangan negara di Indonesia pada tahun 2026. Upaya konsolidasi fiskal nasional saat ini menghadapi tantangan struktural akibat kontraksi Transfer ke Daerah (TKD) serta eskalasi beban anggaran operasional di tingkat lokal yang belum terdistribusi secara efisien.¹ Pengetatan ruang fiskal (*fiscal space*) ini menciptakan risiko *fiscal distress* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pada wilayah kabupaten yang memiliki tingkat ketergantungan finansial tinggi terhadap pendanaan pusat.² Dalam diskursus makroekonomi negara, inefisiensi alokasi anggaran selama siklus politik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah distorsi struktural yang mereduksi kapasitas daerah dalam mendanai ketahanan dan pemulihan ekonomi pasca-pemilu.³

Dalam bingkai Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*), arsitektur penganggaran pemilu pada level badan *adhoc* merepresentasikan potensi kegagalan kebijakan (*government failure*) yang berakar pada rigiditas anggaran dan asimetri informasi.⁴ Karakteristik organisasi *adhoc* yang sangat temporal memicu *agency problem* antara pemerintah daerah (sebagai prinsipal) dan penyelenggara elektoral lokal (sebagai agen), di mana anggaran operasional masif seringkali dieksekusi tanpa mekanisme kendali kelayakan biaya (*cost-effectiveness*).⁵ Kondisi ini berimplikasi pada distorsi insentif dan inefisiensi belanja barang publik, menghasilkan *opportunity cost* di mana porsi fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk percepatan infrastruktur terbebani oleh rigiditas pembiayaan lembaga pemilihan lokal.

¹ Fuad Rakhman and Shahrokh Saudagaran, "The Effect of Political Budget Cycle on Local Governments' Financial Statements in a Young Democracy," *Public Money & Management* 43, no. 5 (July 4, 2023): 512–20, <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2173369>.

² Susilo et al., "The Impact of Fiscal Decentralization on Human Development Index Convergence in Indonesia: An Arellano-Bond GMM Dynamic Panel Data Estimation," *Forum for Social Economics*, January 6, 2026, 1–29, <https://doi.org/10.1080/07360932.2025.2610937>.

³ Juan Pablo Martínez Guzmán, Laura Beachley, and John C. Ronquillo, "Social Equity in Public Budgeting: An Analysis of Maryland's Counties," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 37, no. 6 (December 15, 2025): 413–27, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2025-0148>.

⁴ Jean-Paul Faguet, "Complexity in Institutional Reform," *World Development* 202 (June 2026): 107338, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2026.107338>.

⁵ Toby S James et al., "Electoral Management and the Organisational Determinants of Electoral Integrity: Introduction," *International Political Science Review* 40, no. 3 (June 5, 2019): 295–312, <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>.

Kajian empiris terkini mengenai tata kelola fiskal sektor publik secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kutub utama. Kelompok pertama menyoroti efisiensi penganggaran publik dalam siklus elektoral, dan menemukan bahwa otonomi fiskal daerah yang tidak dikawal oleh pengawasan ketat seringkali memperburuk defisit anggaran dan mengarah pada *rent-seeking behavior* jangka pendek.^{6,7,8} Sementara itu, kelompok kedua berfokus pada tata kelola kelembagaan, dengan menegaskan bahwa kualitas institusional dan sistem pengawasan keuangan terintegrasi jauh lebih determinan dalam menekan kebocoran fiskal dibandingkan semata-mata mengandalkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara individual.^{9,10} Kendati literatur tersebut telah mendialogkan anomali belanja daerah, terdapat *blind spot* yang tajam: mayoritas riset masih terpaku pada instrumen fiskal entitas birokrasi permanen, dan belum ada model integratif yang membedah efektivitas anggaran pada organisasi *adhoc* pembawa beban APBD.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada instrumen fiskal konvensional di pusat-pusat pertumbuhan utama, penelitian ini menawarkan pendekatan kelembagaan ekonomi baru dengan mengintegrasikan model perencanaan, pengawasan, dan realisasi anggaran pada organisasi temporal. Secara spesifik, pengujian tata kelola fiskal dilakukan pada Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai, merepresentasikan karakteristik fiskal daerah berbasis komoditas di luar wilayah episentrum yang memiliki limitasi manuver APBD. Uji Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) pada ekosistem anggaran *adhoc* dalam riset ini diformulasikan bukan sebagai atribut administratif, melainkan sebagai fungsi moderasi guna mengidentifikasi kemampuannya dalam menekan friksi inefisiensi penganggaran temporal.

⁶ Dharendra Wardhana, "Entitlement Programmes for Garnering Votes? The Impact of Local Elections on Targeted Social Protection in Decentralised Indonesia," *International Journal of Development Issues* 20, no. 1 (March 16, 2021): 143–55, <https://doi.org/10.1108/IJDI-04-2020-0070>.

⁷ Septian Bayu Kristanto et al., "Fiscal Decentralization, Governance, and Corruption: Evidence from Indonesian Local Governments (2010–2021)," *Cogent Business & Management* 13, no. 1 (December 31, 2026), <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2652136>.

⁸ Bambang Irawan et al., "How Does Rent-Seeking Processes and Practices in Budget Corruption at the Local Government Case Study in Three Regions of Indonesia," *International Journal of Public Sector Performance Management* 17, no. 1 (2026): 61–84, <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2026.150455>.

⁹ Fuad Rakhman, Ainun Na'im, and Shahrokh Saudagaran, "Horizon Problem and Capital Expenditures: Evidence from the Public Sector in Indonesia," *Asian Review of Accounting* 33, no. 2 (March 11, 2025): 367–85, <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0216>.

¹⁰ Enas Alsaffarini and Bahaa Subhi Awwad, "Governance Quality and Fiscal Discipline: Evidence from an Emerging Economy," *Economies* 14, no. 3 (March 10, 2026): 89, <https://doi.org/10.3390/economies14030089>.

Melalui integrasi model tersebut, penelitian ini mempertahankan posisi teoretis bahwa pengawasan anggaran yang berjenjang berfungsi sebagai instrumen mitigasi paling krusial terhadap risiko kegagalan pasar dan misalokasi fiskal dalam organisasi *adhoc*. Dalam konstelasi tata kelola keuangan negara di tingkat daerah, mengurai efisiensi badan *adhoc* sangat esensial untuk mencegah dekumulasi ruang fiskal. Oleh karena itu, temuan riset ini ditujukan untuk memformulasikan rekomendasi kebijakan restrukturisasi anggaran *adhoc* secara makro mentransformasi paradigma dari sekadar realisasi *sunk cost* jangka pendek, menuju skema keberlanjutan yang menjaga stabilitas ketahanan fiskal daerah pasca-pemilu 2026.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan berikut:

- a. Bagaimana interaksi antara perencanaan dan realisasi anggaran pada lembaga *adhoc* mendistorsi efisiensi alokasi fiskal daerah?
- b. Sejauh mana mekanisme pengawasan keuangan publik secara efektif memitigasi kebocoran belanja elektoral?
- c. Apakah kapasitas institusional mampu memoderasi risiko inefisiensi anggaran tersebut, atau justru ternegasi oleh rigiditas regulasi keuangan negara?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain kausal-fiskal untuk mengevaluasi efisiensi alokasi anggaran Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai selama siklus Pemilihan Kepala Daerah 2024. Pengambilan sampel menggunakan teknik *stratified proportional random sampling*, yang menghasilkan 183 unit observasi terkalibrasi dari total 205 kuesioner awal setelah melalui penapisan ketat terhadap *missing data* dan *outliers* (uji jarak Mahalanobis). Guna mengeliminasi *omitted variable bias*, model ini secara krusial menginkorporasikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan luas rentang geografis tingkat kecamatan sebagai variabel kontrol struktural.¹¹ Seluruh data observasi telah dinyatakan valid dan lolos uji asumsi klasik serta diagnostik yang mencakup pengujian normalitas, multikolinearitas (evaluasi VIF dan *Tolerance*), serta heteroskedastisitas.¹²

¹¹ Blane D. Lewis and Paul Smoke, "Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia," *Fiscal Studies* 38, no. 1 (March 14, 2017): 111–39, <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12080>.

¹² Joseph F. Hair et al., *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*, Classroom Companion: Business (Cham: Springer International Publishing, 2021), Hal, 100. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>.

Pemodelan *Moderated Regression Analysis* (MRA) diaplikasikan sebagai instrumen ekonometrika utama untuk membongkar anomali efisiensi tata kelola di tengah rigiditas regulasi.¹³ Spesifikasi variabel dioperasionalkan secara murni dalam kerangka ekonomi publik: Perencanaan Anggaran (X_1) diukur dari presisi penyusunan RKB; Pengawasan Anggaran (X_2) melalui frekuensi audit internal; Realisasi Anggaran (X_3) dari deviasi penyerapan dana riil; dan Kinerja (Y) dievaluasi dari nihilnya sengketa logistik serta presisi pelaporan akuntansi. Kompetensi Sumber Daya Manusia (Z) diposisikan sebagai proksi kapasitas institusional yang memoderasi tata kelola tersebut. Spesifikasi matematis estimasi MRA dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 Z) + \beta_6 (X_2 Z) + \beta_7 (X_3 Z) + \gamma_1 C_1 + \gamma_2 C_2 + \varepsilon$$

Dalam persamaan tersebut, α adalah konstanta, $\gamma_1 C_1$ dan $\gamma_2 C_2$ merupakan vektor variabel kontrol, sedangkan fokus interpretasi diletakkan pada koefisien interaksi ($\beta_5, \beta_6, \beta_7$). Secara teoretis, jika koefisien interaksi signifikan sementara moderasi utama (Z) tidak, maka variabel bertindak sebagai *pure moderator*; jika keduanya signifikan, ia berfungsi sebagai *quasi moderator*.¹⁴ Pembacaan koefisien estimasi ini tidak sekadar dimaknai dari probabilitas statistik, melainkan dievaluasi sebagai besaran elastisitas tata kelola untuk mengukur efektivitas mitigasi *opportunity cost* pada eksekusi anggaran lembaga temporal.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi ekonometrika dalam penelitian ini dieksekusi menggunakan pemodelan *Moderated Regression Analysis* (MRA) guna menguji mekanisme transmisi dan kausalitas antara instrumen tata kelola anggaran terhadap kinerja finansial lembaga *adhoc*, dengan memasukkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fungsi moderasi. Evaluasi atas efisiensi fiskal ini juga telah menginkorporasikan variabel kontrol struktural untuk memitigasi bias estimasi. Rangkuman komprehensif dari keseluruhan parameter statistik model estimasi, yang mencakup koefisien determinasi parsial, uji signifikansi, hingga interaksi variabel moderasi, disajikan secara utuh pada Tabel 1.

¹³ Imran Ahmad and Andi Chairil Furqan, "The Role of the Government Internal Control System (SPIP) in Budget Optimization in Local Governments in Indonesia," *Journal of Economics and Business Letters* 5, no. 5 (October 30, 2025): 37–50, <https://doi.org/10.55942/jeb.v5i5.751>.

¹⁴ Juan-José Igartua and Andrew F. Hayes, "Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: Concepts, Computations, and Some Common Confusions," *The Spanish Journal of Psychology* 24 (October 14, 2021): e49, <https://doi.org/10.1017/SJP.2021.46>.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Estimasi *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel				
Independen & Interaksi	Koefisien (β)	t-hitung	Signifikansi (p-value)	Keputusan Hipotesis
Perencanaan Anggaran (X_1)	-0,045	-0,540	0,590	Ditolak (Tidak Signifikan)
Pengawasan Anggaran (X_2)	0,265	3,923	0,000	Diterima (Signifikan)
Realisasi Anggaran (X_3)	0,698	6,560	0,000	Diterima (Signifikan)
Moderasi Kompetensi: $X_1 * Z$	0,012	0,314	0,754	Gagal Memoderasi
Moderasi Kompetensi: $X_2 * Z$	-0,028	-0,481	0,631	Gagal Memoderasi
Moderasi Kompetensi: $X_3 * Z$	0,015	0,210	0,834	Gagal Memoderasi
Uji Simultan (F-hitung)	85,913	-	0,000	Model Fit (Signifikan)

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Pemaparan komprehensif pada Tabel 1 memberikan potret makro mengenai arah dan besaran elastisitas tata kelola dari masing-masing instrumen fiskal. Secara empiris, hasil pengujian mendemonstrasikan bahwa tidak seluruh instrumen manajemen keuangan negara konvensional berkorelasi lurus dengan efisiensi kinerja operasional di lapangan. Tingginya signifikansi pada variabel realisasi dan pengawasan berbanding terbalik dengan anomali pada instrumen perencanaan yang terbukti inelastis. Lebih jauh, kegagalan variabel interaksi ($X * Z$) dalam mencapai batas signifikansi ($\alpha < 0,05$) mengonfirmasi bahwa kapasitas individu tidak berstatus sebagai *pure moderator* maupun

quasi moderator. Analisis ekonomi kelembagaan secara spesifik, dekonstruksi teoretis atas anomali determinasi SDM, serta komparasi literatur dari setiap temuan ini dibedah secara mendalam pada sub-bagian berikut.

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai

Hasil pengujian ekonometrika membuktikan bahwa secara parsial, perencanaan anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial maupun operasional Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai, sehingga hipotesis penelitian ditolak. Temuan ini secara fundamental merevisi asumsi manajemen sektor publik tradisional yang kerap mendalilkan perencanaan sebagai penentu mutlak efektivitas organisasi. Dalam kerangka *New Institutional Economics* (NIE), absennya signifikansi ini tidak semata-mata diinterpretasikan sebagai kegagalan administratif di tingkat lokal, melainkan sebagai manifestasi dari kegagalan desain institusional dan asimetri informasi dalam merespons struktur keuangan negara yang sangat kaku.¹⁵

Secara teoretis, anomali ini dapat dibedah melalui lensa Kekakuan Fiskal (*Fiscal Rigidity*). Arsitektur perencanaan anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu didesain dengan hierarki birokrasi yang sangat tersentralisasi (*top-down*) dari pemerintah pusat dan KPU Republik Indonesia. Pola komando ini secara sistematis mendegradasi ruang diskresi fiskal di tingkat daerah.¹⁶ Akibatnya, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) oleh lembaga temporal di wilayah dengan tantangan geografis spesifik seperti Kabupaten Banggai, lebih merepresentasikan formalitas kepatuhan hierarkis (*administrative compliance*) dibandingkan instrumen alokasi sumber daya yang adaptif dan efisien. Proses perencanaan terkunci pada standar biaya masukan nasional yang tidak menyisakan ruang fleksibilitas bagi agen di lapangan.

Memasuki konstelasi tata kelola keuangan negara pasca-Pemilu Serentak 2024 hingga fase konsolidasi di tahun 2026, perencanaan anggaran daerah terbukti inelastis terhadap dinamika kejutan ekonomi (*economic shocks*) berskala lokal. Guncangan berupa fluktuasi inflasi daerah dan disparitas eskalasi biaya logistik di wilayah kepulauan gagal diakomodasi oleh dokumen perencanaan yang telah dipatok jauh hari sebelum tahapan

¹⁵ Demokaan Demirel, "Impact of New Institutional Economics on New Public Management," *Foundations of Management* 17, no. 1 (January 1, 2025): 421–40, <https://doi.org/10.2478/fman-2025-0028>.

¹⁶ Paulina and Susi Adiawaty, "Fiscal Transfers and the Persistence of Regional Inequality: A Critical Review of Indonesia's Intergovernmental Funding System," *Moneta: Journal of Economics and Finance* 3, no. 4 (October 6, 2025): 273–86, <https://doi.org/10.61978/moneta.v3i4.822>.

pemilu dimulai. Ketidakmampuan instrumen perencanaan anggaran dalam mengabsorpsi volatilitas makroekonomi lokal ini menyebabkan dokumen perencanaan terputus (*decoupled*) dari realitas operasional di lapangan.

Oleh karena itu, rasionalitas ekonomi di balik tidak signifikannya perencanaan anggaran bersumber pada fakta bahwa capaian kinerja badan *ad hoc* tidak didikte oleh variabilitas kualitas dokumen perencanaannya, melainkan disrupsi faktor struktural eksogen. Temuan empiris mengenai tidak signifikannya instrumen perencanaan ini secara eksplisit membantah tesis manajemen sektor publik klasik yang senantiasa mengagungkan perencanaan formal sebagai penentu absolut efektivitas organisasi. Sebaliknya, hasil anomali ini justru sejalan dan memperkuat argumentasi Alsaffarini dan Awwad, serta mengonfirmasi peringatan Kristanto et al., yang menegaskan bahwa dalam lanskap birokrasi yang terdesentralisasi namun diikat oleh tata kelola kelembagaan dan regulasi fiskal yang terlampaui kaku perencanaan di atas kertas sering kali teralienasi dari realitas.¹⁷ Dalam kondisi institusional yang sarat akan *red tape* tersebut, dokumen perencanaan kehilangan daya ungkit (*leverage*) terhadap efisiensi eksekusi anggaran riil, sehingga semata-mata berubah menjadi variabel statis yang tidak mampu membendung distorsi inefisiensi.¹⁸

2. Pengaruh Pengawasan Anggaran terhadap Kinerja Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai

Hasil estimasi ekonometrika membuktikan bahwa pengawasan anggaran memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap kinerja manajerial dan finansial Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai, sehingga hipotesis penelitian diterima. Signifikansi empiris ini secara tegas menolak pandangan administratif tradisional yang sekadar menempatkan instrumen pengawasan sebagai rutinitas pemenuhan kepatuhan tata usaha (*administrative compliance*). Sebaliknya, temuan ini mengonfirmasi bahwa pengawasan bertindak sebagai mekanisme kontrol kelembagaan yang esensial untuk mengamankan efisiensi alokasi anggaran publik di tingkat akar rumput.¹⁹

¹⁷ Alsaffarini and Awwad, "Governance Quality and Fiscal Discipline: Evidence from an Emerging Economy."

¹⁸ Kristanto et al., "Fiscal Decentralization, Governance, and Corruption: Evidence from Indonesian Local Governments (2010–2021)."

¹⁹ Christopher Neil Makanga et al., "Enhancing Public Accountability in a City Authority," *Journal of Work-Applied Management* 17, no. 1 (April 3, 2025): 133–46, <https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2023-0111>.

Dalam kerangka keilmuan Ekonomi Publik, fenomena determinan pengawasan ini dapat dibedah secara mendalam melalui lensa Teori Keagenan (*Agency Theory*).²⁰ Struktur birokrasi pada organisasi temporal (*ad hoc*) sarat dengan asimetri informasi yang tajam antara pemerintah daerah selaku prinsipal yang mendanai, dan panitia penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan hingga desa selaku agen pelaksana. Risiko asimetri ini terbukti mengalami eskalasi yang ekstrim seiring dengan meluasnya rentang geografis tingkat kecamatan dan masifnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditangani oleh masing-masing entitas *ad hoc*. Sebagai variabel kontrol struktural, isolasi geografis dan besarnya skala pemilih memperlebar jarak pengawasan fisik antara prinsipal dan agen. Mengingat sifat kelembagaannya yang berdurasi pendek, absennya pengawasan pada wilayah dengan hambatan geografis dan demografis tinggi ini berpotensi memicu perilaku menyimpang (*moral hazard*) serta pencarian rente (*rent-seeking*) dalam eksekusi anggaran logistik operasional yang semakin eksponensial. Oleh karena itu, pengawasan anggaran yang ketat, berlapis, dan terukur tidak lagi sekadar dimaknai sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai instrumen ekonomi (*monitoring mechanism*) yang sangat determinan dalam menekan biaya keagenan (*agency cost*) dan mencegah kerugian negara berskala masif (*deadweight loss*).

Kontekstualisasi dari temuan ini menjadi sangat krusial ketika ditarik pada lanskap makro-fiskal Indonesia pasca-Pemilu Serentak 2024. Memasuki fase konsolidasi tata kelola keuangan negara di tahun 2026, mitigasi kebocoran anggaran negara (*state budget leakage*) menjadi agenda supremasi, sejalan dengan kebijakan pengetatan audit dan pelaporan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap dana hibah Pilkada. Bagi entitas pemerintahan daerah berbasis komoditas dengan volatilitas pendapatan dan ruang manuver fiskal yang ketat seperti Kabupaten Banggai, pencegahan inefisiensi dana publik pada institusi *ad hoc* bernilai sangat strategis. Mekanisme pengawasan anggaran yang optimal terbukti mampu mereduksi kebocoran finansial dan mencegah dekumulasi ruang fiskal (*fiscal space*), sehingga sisa kelonggaran anggaran tersebut dapat direalokasikan secara produktif untuk memperkuat program ketahanan ekonomi lokal pasca-pemilu.

Secara diskursif, temuan empiris mengenai signifikansi absolut instrumen pengawasan ini sejalan dan melengkapi model ekonometrika yang dibangun oleh

²⁰ Kathleen M. Eisenhardt, "Agency Theory: An Assessment and Review," *Academy of Management Review* 14, no. 1 (January 1989): 57–74, <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>.

Rakhman, Na'im, dan Saudagaran mengenai pentingnya kontrol tata kelola kelembagaan untuk memitigasi anomali belanja modal di sektor publik.²¹ Di sisi lain, hasil penelitian di Kabupaten Banggai ini sekaligus menjawab dan memberikan antitesis solutif atas titik buta (*blind spot*) yang diperingatkan oleh Wardhana (2021) dan Irawan et al. (2026).^{22,23} Mereka sebelumnya berargumen bahwa tanpa mekanisme *monitoring* yang ketat, desentralisasi dan otonomi fiskal daerah dalam siklus elektoral akan selalu bermuara pada perilaku pencarian rente jangka pendek. Bukti dalam riset ini mengonfirmasi bahwa pengawasan struktural yang terukur adalah satu-satunya instrumen penawar yang mampu meredam *rent-seeking behavior* tersebut pada lembaga non-permanen.

3. Pengaruh Realisasi Anggaran terhadap Kinerja Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai

Hasil uji ekonometrika secara empiris membuktikan bahwa variabel realisasi anggaran memiliki daya dorong paling dominan dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial maupun ketahanan operasional Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai. Temuan ini secara eksplisit menerima rumusan hipotesis penelitian. Berbeda dengan instrumen perencanaan yang cenderung terjebak pada rigiditas dokumen administratif yang statis, keberhasilan eksekusi anggaran (*budget execution*) terbukti menjadi determinan utama yang mampu mengartikulasikan cetak biru kebijakan menjadi *output* pelayanan elektoral secara riil di lapangan.²⁴

Dalam diskursus Ekonomi Negara (*State Economics*), superioritas pengaruh dari realisasi anggaran ini dapat dibedah melalui pilar Efisiensi Alokatif (*Allocative Efficiency*). Mengacu pada spesifikasi metodologis mengenai elastisitas tata kelola, temuan ini mendemonstrasikan bahwa capaian kinerja operasional lembaga *ad hoc* bersifat sangat elastis (responsif) terhadap presisi eksekusi anggaran. Secara matematis dan operasional, setiap terjadinya penurunan deviasi penyerapan anggaran riil di lapangan akan diikuti oleh perbaikan eksponensial dalam mengeliminasi hambatan transaksional di dalam rantai pasok (*supply chain*) distribusi logistik pemilu. Dengan tingkat penyerapan dana

²¹ Rakhman, Na'im, and Saudagaran, "Horizon Problem and Capital Expenditures: Evidence from the Public Sector in Indonesia."

²² Wardhana, "Entitlement Programmes for Garnering Votes? The Impact of Local Elections on Targeted Social Protection in Decentralised Indonesia."

²³ Irawan et al., "How Does Rent-Seeking Processes and Practices in Budget Corruption at the Local Government Case Study in Three Regions of Indonesia."

²⁴ Rischa Inung Fauziah et al., "Performance-Based Budgeting and Regional Financial Performance: The Role of Productive Expenditure and Accountability," *Al Dzahab: Journal of Economics, Management, Business and Accounting* 7, no. 1 (March 17, 2026): 110–18, <https://doi.org/10.32939/dhb.v7i1.5870>.

yang sangat responsif, friksi operasional asimetris seperti defisit biaya *overhead* lokal maupun keterlambatan pengadaan perangkat pemilihan di wilayah dengan tantangan demografis dapat direduksi secara masif. Tingginya elastisitas tata kelola inilah yang pada akhirnya menjamin dan bermuara pada tercapainya indikator utama kinerja, yakni nihilnya sengketa logistik di tingkat akar rumput.

Relevansi kebaruan dari temuan ini menemukan signifikansi tertingginya ketika dikontekstualisasikan pada lanskap konsolidasi makro-fiskal daerah di periode 2025–2026. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anomali atau kelambatan dalam realisasi anggaran pemilu berskala masif (*under-spending*) terbukti sering kali mendistorsi ketahanan fiskal di tahun berikutnya. Keterlambatan ini umumnya bermanifestasi pada pembengkakan instrumen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak produktif dan mengendap di perbankan daerah.

Oleh karena itu, tingginya efektivitas serapan belanja yang dieksekusi oleh lembaga *adhoc* di Kabupaten Banggai menyajikan model mitigasi risiko fiskal daerah yang mumpuni. Bukti empiris mengenai tingginya elastisitas realisasi anggaran ini secara eksplisit mengonfirmasi temuan Guzmán, Beachley, dan Ronquillo yang menegaskan bahwa akselerasi serapan dana publik adalah instrumen utama untuk menekan kerugian ekonomi di tingkat lokal.²⁵ Sekaligus, temuan di wilayah komoditas ini memberikan antitesis terhadap studi-studi terdahulu sebagaimana dikritisi dalam kajian Putri dan Ratnawati yang kerap menganggap rendahnya serapan anggaran sekadar persoalan administratif kas biasa.²⁶ Berbeda dengan pandangan konvensional tersebut, riset ini membuktikan bahwa realisasi yang terakselerasi dengan presisi mampu mencegah dana hibah publik terdegradasi menjadi *idle money* (dana menganggur). Penghindaran terhadap akumulasi SiLPA fiktif ini pada gilirannya mengamankan stabilitas ruang fiskal daerah (*fiscal space*), membebaskan pemerintah lokal dari ancaman *fiscal drag* (perlambatan laju perekonomian), serta mengembalikan fungsi APBD sebagai katalis pemulihan ekonomi pasca-pemilu serentak.

²⁵ Guzmán, Beachley, and Ronquillo, "Social Equity in Public Budgeting: An Analysis of Maryland's Counties."

²⁶ Salsabila Pramestya Putri and Dyah Ratnawati, "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jesya* 6, no. 2 (June 1, 2023): 2068–82, <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>.

4. Pengaruh Perencanaan, Pengawasan, dan Realisasi Anggaran terhadap Kinerja Badan Adhoc

Hasil estimasi ekonometrika membuktikan bahwa interaksi antara perencanaan, pengawasan, dan realisasi anggaran memberikan pengaruh positif dan determinan secara simultan terhadap kinerja operasional serta ketahanan finansial Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai. Probabilitas statistik yang dihasilkan secara empiris mengonfirmasi tingkat signifikansi absolut, yang memvalidasi bahwa ketiga instrumen fiskal tersebut membentuk satu kesatuan ekosistem manajerial yang tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan pandangan sektoral terdahulu yang kerap mengisolasi kegagalan instansi publik pada satu variabel tunggal, temuan ini menawarkan diskursus akademis baru yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak dapat dioperasikan secara parsial.

Dalam konstruksi *Good Financial Governance* (GFG) pada sektor publik, ketangguhan institusi merupakan produk dari sinergi antar-instrumen.²⁷ Hasil uji interaksi simultan ini membuktikan sebuah mekanisme kompensasi kelembagaan yang krusial: meskipun dokumen perencanaan di tingkat daerah sering kali terbelenggu oleh kekakuan regulasi pusat (*fiscal rigidity*), inefisiensi tersebut nyatanya dapat diredam secara empiris apabila instrumen pengawasan yang berlapis dan presisi eksekusi pencairan dana berjalan dengan optimal. Lebih jauh, signifikansi simultan ini sekaligus mengonfirmasi ketangguhan (*robustness*) dari ekosistem tata kelola tersebut. Sinergi ketiga instrumen fiskal ini terbukti tangguh dalam memitigasi inefisiensi alokasi, terlepas dari seberapa besar tekanan struktural yang direpresentasikan oleh variabel kontrol. Baik pada entitas *ad hoc* yang beroperasi di kecamatan dengan demografi pemilih (DPT) yang sangat padat, maupun pada wilayah dengan tantangan isolasi geografis yang ekstrem, orkestrasi ketiga instrumen ini secara konsisten mampu meredam kerugian ekonomi publik (*deadweight loss*).

Elevasi dari temuan ini menempatkan tata kelola kelembagaan fiskal lokal di Indonesia sejajar dengan diskursus *Good Financial Governance* di tingkat global. Mengomparasikan inefisiensi anggaran operasional *ad hoc* di Indonesia dengan fenomena serupa di negara-negara berkembang transisional seperti di kawasan Amerika Latin

²⁷ Tanzeem Hasnat, "From Budgets to Better Lives: How Governance Shapes Fiscal Effectiveness in Human Capital Formation," *Transforming Government: People, Process and Policy* 19, no. 4 (November 7, 2025): 814–38, <https://doi.org/10.1108/TG-04-2025-0109>.

maupun Afrika Sub-Sahara memperlihatkan pola kerentanan kelembagaan yang sama akibat desentralisasi fiskal yang tidak terintegrasi. Ketangguhan ekosistem pengawasan berlapis dan akselerasi serapan di tingkat lokal yang terbukti di Kabupaten Banggai ini merepresentasikan standar mitigasi kebocoran anggaran yang sangat direkomendasikan oleh institusi moneter global. Hal ini membuktikan bahwa integrasi instrumen fiskal adalah prasyarat universal bagi stabilitas keuangan daerah di negara dengan sistem demokrasi desentralistik.

Oleh karena itu, temuan empiris ini membawa implikasi kebijakan (*policy impact*) yang sangat strategis dalam merespons tuntutan reformasi tata kelola keuangan negara di tahun 2026. Menghadapi potensi disrupsi pendanaan publik dan keharusan konsolidasi pasca-Pemilu Serentak 2024, pemerintah daerah dan lembaga vertikal dituntut untuk meninggalkan paradigma manajemen yang terfragmentasi (*silo*). Mengingat ketangguhan ekosistem ini telah teruji dalam meredam tekanan struktural demografis dan geografis, rekomendasi kebijakan yang lahir mensyaratkan adanya orkestrasi sistem keuangan berbasis digital yang terintegrasi penuh dari hulu (perencanaan kebutuhan) hingga ke hilir (pengawasan berlapis dan realisasi serapan). Model orkestrasi kelembagaan yang terdesentralisasi sekaligus terdigitalisasi ini tidak hanya mengamankan efektivitas operasional badan *ad hoc* di masa-masa kritis, melainkan juga meletakkan fondasi yang solid bagi ketahanan fiskal daerah (*local fiscal resilience*) dalam menyerap berbagai guncangan ekonomi di masa depan.

5. Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Memoderasi Pengaruh Pengelolaan Anggaran terhadap Kinerja Badan Adhoc

Hasil estimasi ekonometrika menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) secara empiris membuktikan bahwa variabel interaksi antara instrumen pengelolaan anggaran dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menghasilkan probabilitas yang signifikan. Berdasarkan kerangka spesifikasi model tersebut, dapat dinyatakan secara eksplisit bahwa variabel Kompetensi SDM (*Z*) gagal memenuhi kualifikasi ekonometrika baik sebagai *pure moderator* maupun *quasi moderator*.²⁸ Secara absolut, kompetensi SDM gagal memoderasi baik memperkuat maupun memperlemah pengaruh tata kelola fiskal terhadap kinerja Badan Adhoc KPU Kabupaten Banggai. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat efisiensi dan ketahanan operasional lembaga temporal

²⁸ Demirel, "Impact of New Institutional Economics on New Public Management."

tersebut murni didikte oleh mekanisme sistemik, tanpa sedikit pun terintervensi oleh tinggi-rendahnya keahlian atau kapasitas individual aparaturnya di lapangan.

Anomali empiris ini memantik dekonstruksi radikal terhadap doktrin *Human Capital Theory* dan asumsi manajemen klasik. Kegagalan moderasi kompetensi SDM dalam riset ini secara tajam membantah tesis tradisional yang selalu mempostulatkan bahwa investasi pada kapasitas individu adalah determinan tunggal bagi efisiensi institusi. Sebaliknya, temuan anomali ini justru memvalidasi peringatan teoretis dari Alsaffarini dan Awwad, yang menyimpulkan bahwa realitas tata kelola birokrasi keuangan negara di negara berkembang sesungguhnya dikarakterisasi oleh tingkat formalisasi ekstrem, standardisasi institusional yang absolut, serta *red tape* (hambatan birokrasi) yang sangat tebal.²⁹ Dalam ekosistem fiskal yang terlampau rigid ini, kapasitas dan kebebasan bertindak individu pada akhirnya ternegasi oleh sistem (*individual agency is constrained by institutional rigidities*). Fenomena *lock-in effect* secara nyata terjadi, di mana seluruh perilaku dan manuver eksekusi anggaran oleh panitia *ad hoc* dikunci rapat oleh regulasi yang kaku, sehingga kompetensi personal menjadi variabel yang usang dan tidak relevan dalam mengubah *output* kinerja.³⁰

Lebih jauh, dalam konteks kelembagaan *ad hoc* yang rentan terhadap asimetri informasi antara pemerintah pusat selaku pemegang mandat dan agen di tingkat desa/kecamatan, negara memaksakan instrumen Standardisasi Institusional untuk mencegah *moral hazard*. Standardisasi ini secara efektif memandu seluruh proses perencanaan, pengawasan, hingga realisasi anggaran tanpa menyisakan ruang diskresi bagi agen. Konsekuensinya, keberhasilan serapan anggaran dan kualitas tata kelola keuangan pada institusi ini sepenuhnya disetir oleh kepatuhan terhadap pedoman terpusat, bukan oleh kecakapan intelektual atau manajerial staf secara individual.

Memasuki konstelasi perdebatan ekonomi makro tahun 2026 terkait efisiensi alokasi belanja pegawai (*human investment*), temuan ini menawarkan kebaruan (*novelty*) sekaligus sinyal kebijakan (*policy signal*) yang sangat tegas. Bagi entitas institusi yang bersifat ekstraktif dan *ad hoc*, pemerintah tidak perlu lagi menghamburkan ruang fiskal (APBN/APBD) secara tidak efisien untuk membiayai program pelatihan SDM atau bimbingan teknis yang berlebihan setiap kali menjelang siklus pemilu. Penambahan

²⁹ Alsaffarini and Awwad, "Governance Quality and Fiscal Discipline: Evidence from an Emerging Economy."

³⁰ Maarten de Jong, "The Evolution of Budgeting Practices," in *Contemporary Issues and Challenges in Public Financial Management* (Cham: Springer Nature Switzerland, 2025), 125–63, https://doi.org/10.1007/978-3-031-81136-4_5.

kapasitas SDM pada level operasional bawah terbukti menjadi dis-efisiensi fiskal yang sia-sia apabila tidak dibarengi dengan simplifikasi regulasi keuangan. Oleh karena itu, investasi negara ke depan wajib dialihkan secara fundamental dari belanja pegawai temporal menuju belanja modal (kapital) untuk penguatan sistem digitalisasi anggaran secara holistik (*e-budgeting*).

Pergeseran strategis dari investasi SDM konvensional menuju Standardisasi Institusional dan digitalisasi keuangan negara (*e-government*) ini nyatanya bukan sekadar anomali empiris di Kabupaten Banggai. Konteks ini merepresentasikan sebuah konvergensi kebijakan makroekonomi yang saat ini sedang diadopsi secara masif oleh berbagai negara berkembang di lanskap global. Sebagaimana terekam dalam diskursus desentralisasi fiskal internasional, inisiatif serupa terbukti menjadi fondasi reformasi ketahanan fiskal di kawasan Amerika Latin serta transformasi akuntabilitas publik di berbagai entitas sub-nasional Afrika Sub-Sahara.^{31,32} Pada akhirnya, instrumen sistem digital-lah yang secara struktural mampu memandu, mengunci, dan menggaransi efisiensi kinerja keuangan negara secara berkelanjutan, melampaui limitasi dan fluktuasi keahlian individu sesaat.

Dekonstruksi radikal terhadap asumsi manajemen klasik dan penegasan kebaruan implikasi kebijakan fiskal dari temuan riset ini dapat dipetakan secara komprehensif melalui matriks pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Matriks Dekonstruksi Teoretis dan Kebaruan Kebijakan Fiskal *Adhoc*

Dimensi Tata Kelola	<i>Human Capital Theory</i>	<i>New Institutional Economics</i>
Determinan Kinerja Publik	Kapasitas, keahlian, dan intervensi manajerial individu.	Mekanisme sistemik dan kepatuhan absolut terhadap pedoman terpusat.
Dinamika Birokrasi	Agen memiliki ruang diskresi dan kebebasan	<i>Lock-in effect</i> : Manuver agen ternegasi oleh formalisasi ekstrem

³¹ Davi Bhering Buarque de Gusmao et al., “Fiscal Decentralization and Cyclicity in Latin America,” *IMF Working Papers* 2026, no. 092 (May 2026): 1, <https://doi.org/10.5089/9798229046909.001>.
³² Mustafe Mahamoud Abdillahi, “Fiscal Decentralization: A Review of Theories, Evidence, and Policy Implications,” *African Multidisciplinary Journal of Development* 14, no. 1 (December 5, 2025): 229–50, <https://doi.org/10.59568/AMJD-2025-14-1-19>.

(Agency)	bertindak operasional.	dan <i>red tape</i> .
Mitigasi Moral Hazard	Peningkatan kompetensi dan kesadaran staf secara individual.	Penerapan Standardisasi Institusional yang memandu eksekusi tanpa diskresi.
Efisiensi Alokasi APBN/APBD	Belanja pegawai (<i>human investment</i>) via diklat/bimtek SDM temporal.	Belanja modal (kapital) holistik untuk sistem digitalisasi anggaran (<i>e-budgeting</i>).
Konteks Makroekonomi	Pemecahan masalah manajerial yang bersifat lokal atau kasuistik.	Merepresentasikan konvergensi reformasi ketahanan fiskal global di negara berkembang.

Sumber: Analisis dan Sintesis Penulis

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi alokasi fiskal pada lembaga *ad hoc* tidak didikte oleh perencanaan anggaran yang statis dan kaku, melainkan didorong secara dominan oleh akselerasi realisasi anggaran yang responsif dalam mengeliminasi hambatan rantai pasok operasional. Selanjutnya, mekanisme pengawasan keuangan yang ketat terbukti bertindak sebagai instrumen determinan yang sangat efektif untuk memitigasi asimetri informasi dan mencegah kebocoran belanja elektoral di daerah. Lebih jauh, kapasitas kompetensi sumber daya manusia dipastikan gagal memoderasi risiko inefisiensi anggaran tersebut, lantaran kebebasan bermanuver individu secara absolut telah ternegasi oleh rigiditas regulasi tata kelola keuangan negara (*lock-in effect*). Sebagai implikasi kebijakan, integrasi antara pengawasan berlapis dan presisi eksekusi serapan yang ditopang oleh penguatan sistem digitalisasi anggaran (*e-budgeting*) menjadi prasyarat struktural mutlak guna menjamin ketahanan fiskal publik, melampaui sekadar ketergantungan pada investasi keahlian staf temporal semata.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Imran, and Andi Chairil Furqan. "The Role of the Government Internal Control System (SPIP) in Budget Optimization in Local Governments in Indonesia." *Journal of Economics and Business Letters* 5, no. 5 (October 30, 2025): 37–50. <https://doi.org/10.55942/jeb.v5i5.751>.

- Alsaffarini, Enas, and Bahaa Subhi Awwad. "Governance Quality and Fiscal Discipline: Evidence from an Emerging Economy." *Economies* 14, no. 3 (March 10, 2026): 89. <https://doi.org/10.3390/economies14030089>.
- Bhering Buarque de Gusmao, Davi, Hector Perez-Saiz, Joe Ue, and Valeria Visser. "Fiscal Decentralization and Cyclicalities in Latin America." *IMF Working Papers* 2026, no. 092 (May 2026): 1. <https://doi.org/10.5089/9798229046909.001>.
- Demirel, Demokaan. "Impact of New Institutional Economics on New Public Management." *Foundations of Management* 17, no. 1 (January 1, 2025): 421–40. <https://doi.org/10.2478/fman-2025-0028>.
- Eisenhardt, Kathleen M. "Agency Theory: An Assessment and Review." *Academy of Management Review* 14, no. 1 (January 1989): 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>.
- Faguet, Jean-Paul. "Complexity in Institutional Reform." *World Development* 202 (June 2026): 107338. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2026.107338>.
- Fauziah, Rischa Inung, Fandi Galang Wicaksana, Desiana Rachmawati, Richatul Jannah, and Kurniana Sandra Lungit. "Performance-Based Budgeting and Regional Financial Performance: The Role of Productive Expenditure and Accountability." *Al Dzahab: Journal of Economics, Management, Business and Accounting* 7, no. 1 (March 17, 2026): 110–18. <https://doi.org/10.32939/dhb.v7i1.5870>.
- Guzmán, Juan Pablo Martínez, Laura Beachley, and John C. Ronquillo. "Social Equity in Public Budgeting: An Analysis of Maryland's Counties." *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 37, no. 6 (December 15, 2025): 413–27. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2025-0148>.
- Hair, Joseph F., G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, Marko Sarstedt, Nicholas P. Danks, and Soumya Ray. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R. Classroom Companion: Business*. Cham: Springer International Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>.
- Hasnat, Tanzeem. "From Budgets to Better Lives: How Governance Shapes Fiscal Effectiveness in Human Capital Formation." *Transforming Government: People, Process and Policy* 19, no. 4 (November 7, 2025): 814–38. <https://doi.org/10.1108/TG-04-2025-0109>.
- Igartua, Juan-José, and Andrew F. Hayes. "Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: Concepts, Computations, and Some Common Confusions." *The Spanish Journal of Psychology* 24 (October 14, 2021): e49. <https://doi.org/10.1017/SJP.2021.46>.
- Irawan, Bambang, Achmad Nurmandi, N.A. Salahudin, Paisal Akbar, and Muhammad Ilham Effendy. "How Does Rent-Seeking Processes and Practices in Budget Corruption at the Local Government Case Study in Three Regions of Indonesia." *International Journal of Public Sector Performance Management* 17, no. 1 (2026): 61–84. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2026.150455>.
- James, Toby S, Holly Ann Garnett, Leontine Loeber, and Carolien van Ham. "Electoral Management and the Organisational Determinants of Electoral Integrity: Introduction." *International Political Science Review* 40, no. 3 (June 5, 2019): 295–

312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>.
- Jong, Maarten de. "The Evolution of Budgeting Practices." In *Contemporary Issues and Challenges in Public Financial Management*, 125–63. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81136-4_5.
- Kristanto, Septian Bayu, Ratna Wardhani, Dodik Siswantoro, and Mahjus Ekananda. "Fiscal Decentralization, Governance, and Corruption: Evidence from Indonesian Local Governments (2010–2021)." *Cogent Business & Management* 13, no. 1 (December 31, 2026). <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2652136>.
- Lewis, Blane D., and Paul Smoke. "Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia." *Fiscal Studies* 38, no. 1 (March 14, 2017): 111–39. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12080>.
- Mahamoud Abdillahi, Mustafe. "Fiscal Decentralization: A Review of Theories, Evidence, and Policy Implications." *African Multidisciplinary Journal of Development* 14, no. 1 (December 5, 2025): 229–50. <https://doi.org/10.59568/AMJD-2025-14-1-19>.
- Makanga, Christopher Neil, Laura A. Orobia, Twaha Kigongo Kaawaase, Isaac Nkote Nabeta, Rachel Mindra Katoroogo, and John Munene. "Enhancing Public Accountability in a City Authority." *Journal of Work-Applied Management* 17, no. 1 (April 3, 2025): 133–46. <https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2023-0111>.
- Paulina, and Susi Adiawaty. "Fiscal Transfers and the Persistence of Regional Inequality: A Critical Review of Indonesia's Intergovernmental Funding System." *Moneta: Journal of Economics and Finance* 3, no. 4 (October 6, 2025): 273–86. <https://doi.org/10.61978/moneta.v3i4.822>.
- Putri, Salsabila Pramestya, and Dyah Ratnawati. "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan SILPA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jesya* 6, no. 2 (June 1, 2023): 2068–82. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>.
- Rakhman, Fuad, Ainun Na'im, and Shahrokh Saudagaran. "Horizon Problem and Capital Expenditures: Evidence from the Public Sector in Indonesia." *Asian Review of Accounting* 33, no. 2 (March 11, 2025): 367–85. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0216>.
- Rakhman, Fuad, and Shahrokh Saudagaran. "The Effect of Political Budget Cycle on Local Governments' Financial Statements in a Young Democracy." *Public Money & Management* 43, no. 5 (July 4, 2023): 512–20. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2173369>.
- Susilo, Ferry Prasetyia, Nayaka Artha Wicesa, and Firdaus Finuliyah. "The Impact of Fiscal Decentralization on Human Development Index Convergence in Indonesia: An Arellano-Bond GMM Dynamic Panel Data Estimation." *Forum for Social Economics*, January 6, 2026, 1–29. <https://doi.org/10.1080/07360932.2025.2610937>.
- Wardhana, Dharendra. "Entitlement Programmes for Garnering Votes? The Impact of Local Elections on Targeted Social Protection in Decentralised Indonesia." *International Journal of Development Issues* 20, no. 1 (March 16, 2021): 143–55. <https://doi.org/10.1108/IJDI-04-2020-0070>.